

## INTISARI

Fenomena segregasi permukiman, ketimpangan infrastruktur, kemacetan di pusat kota dan kenaikan harga lahan dipengaruhi oleh adanya peningkatan dan perkembangan penduduk di kota Pekanbaru. Kajian seputar ketimpangan berkaitan erat pada kondisi aksesibilitas dari tempat hunian menuju pusat kegiatan permukiman kota. Prinsip *equitable planning* dapat mengurangi kesenjangan sosio-ekonomi serta kesetaraan akses dan distribusi sumber daya yang adil menjadikan kajian penelitian ini menjadi perwujudan tujuan bersama menuju kota yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat yang berada pada kondisi kurang menguntungkan.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi zona timpang dari tingkat aksesibilitas sarana layanan dasar permukiman di Kota Pekanbaru dan menilai faktor penyebab dari zona timpang tersebut. Objektivitas keadilan dari dimensi prosedural, distribusional, dan struktural akan menjadi acuan dalam mendalami bentuk ketimpangan aksesibilitas dan kesempatan masyarakat pada distribusi layanan dasar di Kota Pekanbaru secara kontekstual. Adapun metode yang digunakan adalah *mixed methode* model *sequential explanatory* dengan metode analisis spasial dan deduktif koding. Adapun indikator penilaian zona timpang menggunakan indeks aksesibilitas dari parameter radius, jarak, dan waktu. Kemudian dilanjutkan penilaian penyebab melalui pengaruh karakteristik, preferensi dan prioritas kebijakan. Manfaat penelitian ini sebagai pengayaan teoritis dan praktis dalam menjelaskan bentuk ketimpangan layanan dasar dan penyebabnya terhadap pembentukan ketimpangan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk zona timpang.

Hasil dari penelitian adalah zona timpang pada permukiman Kota Pekanbaru terbentuk akibat adanya ketimpangan aksesibilitas layanan dasar yang mempengaruhi kesempatan dalam akses, hak, dan peluang hidup masyarakat khususnya zona timpang aksesibilitas. Faktor penyebab utama ketimpangan adalah basis perencanaan berpedoman market driven/ mekanisme pasar, sehingga secara struktural distribusi layanan dan pemanfaatan lahan mengikuti perkembangan pasar dan pertumbuhan penduduk. Konteks keadilan sosio-spasial dengan pendekatan *equitable* menjadi hal penting dalam pertimbangan perencanaan layanan kota baik dalam menilai objektivitas keadilan secara prosedural, distribusional, maupun struktural, sehingga dapat mewujudkan kota yang lebih inklusif dan mengurangi kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat kota.

## ABSTRACT

The phenomenon of settlement segregation, infrastructure inequality, traffic congestion in the city center, and rising land prices are influenced by the population growth and development in the city of Pekanbaru. Studies on inequality are closely related to the accessibility conditions from residential areas to the center of urban settlement activities. The principle of equitable planning can reduce socio-economic disparities and ensure equal access and fair distribution of resources, making this research a realization of the shared goal towards a fair and inclusive city for all, especially for communities in less favorable conditions..

The aim of this research is to identify disparate zones in the level of accessibility to basic settlement services in Pekanbaru City and assess the causal factors of these disparate zones. The objectivity of justice in procedural, distributional, and structural dimensions will serve as a reference for delving into the forms of accessibility disparities and opportunities for the distribution of basic services in Pekanbaru City contextually. The method used is a mixed-method sequential explanatory model with spatial analysis and deductive coding methods. The assessment indicators of disparate zones use accessibility indexes based on radius, distance, and time parameters. The evaluation of causes is then carried out through the influence of characteristics, preferences, and policy priorities. The benefits of this research lie in theoretical and practical enrichment in explaining the forms of disparities in basic services and their causes in shaping disparities in opportunities for meeting the basic needs of populations in disparate zones.

The results of the study indicate that disparate zones in the settlements of Pekanbaru City are formed due to disparities in accessibility to basic services, affecting opportunities in access, rights, and life chances, especially in areas with disparate accessibility. The main contributing factor to these disparities is the planning based on a market-driven approach, leading to structural distribution of services and land utilization following market trends and population growth. The socio-spatial justice context, with an equitable approach, is crucial in urban service planning considerations, assessing the objectivity of justice in procedural, distributional, and structural aspects, thereby working towards creating a more inclusive city and reducing socio-economic disparities among urban communities.